

PENULISAN HUKUM / SKRIPSITINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA (Studi di Pemerintah Daerah Kota Batu)

 Oleh: WULAN OKTAVIANTI (03400222)

Law

Dibuat: 2010-03-31 , dengan 3 file(s).

Keywords: Kata kunci: Pelaksanaan, Fungsi, Perencanaan

ABSTRAKSI

Seiring dengan pemberlakuan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka perencanaan pembangunan daerah telah diserahkan kepada pemerintah daerah. yang merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penelitian ini mengambil permasalahan antara lain: bagaimana pelaksanaan fungsi Bappeda dalam merencanakan pembangunan daerah di Kota Batu, kendala apa yang dihadapi oleh Bappeda dalam pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan daerah di Kota Batu, dan upaya apa yang dilakukan oleh Bappeda dalam menghadapi kendala pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan.

Penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, teknik pengumpulan datanya berupa wawancara dengan Kepala Bappeda, dan Kabid Bappeda dan observasi langsung ke lokasi penelitian di Bappeda Kota Batu sebagai tempat pengambilan data primer. Kemudian data hasil penelitian tersebut dianalisa secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan fungsi Bappeda kota Batu belum terlaksana dengan maximal, dikarenakan ada fungsi yang belum dilaksanakan dengan baik antara lain: perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan daerah, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, dan pembinaan serta pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah. Adapun kendala yang dihadapi adalah kualitas SDM yang rendah baik itu dari instansi pemerintah maupun masyarakat kota Batu, tidak adanya kerjasama yang baik antara instansi pemerintah dengan masyarakat, sistem penganggaran ABK dianggap kurang efektif, dan tidak adanya koordinasi yang tertib serta pembagian tugas dan wewenang yang baik. Upaya yang dilakukan Bappeda antara lain peningkatan kualitas SDM baik dari pihak instansi pemerintah maupun masyarakat, pemangkasan atau pengurangan kegiatan yang ada dan lebih difokuskan kepada kegiatan yang lebih penting dan mendesak, menarik minat investor sebanyak mungkin, dan culture reform.

Oleh karena pelaksanaan fungsi Bappeda kota Batu belum maximal maka penulis menyarankan agar dilakukannya sebuah culture reform dan pembuatan peraturan yang mengatur mengenai konsekuensi hukum atas kinerja badan atau dinas pemerintahan.

ABSTRACT

Together with the enactment of UU No. 32 year 2004 concerning Regional Government and UU No. 33 year 2004 concerning Financial Balance between Central Government and Regional Government, therefore regional development plan is given to regional government, which is the

planning component of regional government implementation.

This study is dealing with following issues: how does the functional implementation of Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) due to planning regional development in Kota Batu, what obstacles faced by Bappeda during the implementation of regional development planning function in Kota Batu, and what attempts has been done by Bappeda in dealing with those obstacles.

Author is using sociological jurisdiction approach, data collection technique is using interview with Kepala Bappeda, and Kabid Bappeda also supported by direct observation on location at Bappeda Kota Batu as primary data collection place. Subsequently, results data is analyzed descriptively.

Based on the study result, function implementation of Bappeda Kota Batu is not yet maximally conducts, since there are functions that were not carried out appropriately such as: technical policy formulation in the field of regional development, coordination of developmental planning establishment, and training also task implementation in the field of regional development planning. Several obstacles faced by Bappeda is low quality of human resources whether from governmental institution or society, less effective of ABK budgeting system, and lack of sufficient coordination and proper delegation of task and authority. Attempts done by Bappeda were to improve human resources quality either from government institution or the society, reduce or diminish the existing activities and giving more attention toward more important and crucial activities, draw interest of investors as many as possible and culture reform.

Since the implementation function of Bappeda Kota Batu is not yet maximally conduct, author suggested to do culture reform and generating rules which arrange legal consequences of governance office performance.